



**SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU**

**MEDIA : Ambon Ekspres**

**Ameks, 13 April 2017**

## **Jaksa Lidik Tambatan Perahu Pulau Kassa**

Ambon - Diam-diam, ternyata Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) sementara progreskan penyelidikan atas adanya dugaan tindak pidana korupsi pada proyek tambatan perahu Pulau Kassa di Desa Kaibobu, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten SBB. Sumber koran ini dilingkup Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Rabu (13/4) menyebutkan, ada perintah dari Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku, Manumpak Pane kepada pihak Kejari SBB untuk melakukan pengusutan terhadap proyek yang bersumber dari APBD tahun 2016 senilai Rp 1 miliar lebih melalui Dinas Pariwisata SBB. "Ya, kalau dugaan itu sementara telah disampaikan kepada pihak Kejari SBB untuk mengusutnya," kata sumber.

Menurut sumber, biasanya terhadap suatu temuan adanya indikasi perbuatan melawan hukum berdasarkan perintah dari atasan selalu dan harus ditindaklanjuti. Karena, itu merupakan suatu tanggung jawab dan kewenangan dari pihak kejaksaan. Dimana, proyek tersebut diduga dikerajakan PT Nesta dengan direktornya bernama Arief berdasarkan proses lelang.

Akan tetapi, dilapangan yang kerjakan adik kandung mantan Bupati SBB, Ambo Puttileihalat. Dimana tahun 2016 hingga masa berakhirnya adendum di Februari 2017 pekerjaan tersebut tidak berhasil diselesaikan. "Jadi, kedudukan kasusnya adalah proyek tersebut dikerjakan kontraktor, Ambo Puttileihalat dengan menggunakan PT Nesta selaku pemenang tender. Dan dalam pelaksanaannya proyek tersebut anggaranya telah dicairkan 100 persen tanpa penyelesaian pekerjaan," jelas sumber.

Sementara itu, tokoh masyarakat Negeri Kaibobu, Enggel Riry kepada Ambon Ekspres via selulernya mendukung langkah kejaksaan untuk mengusut adanya aroma korupsi pada proyek pembangunan tambatan perahu di Pulau Kassa. "Artinya, kami sangat mendukung apabila ada tindakan dari pihak kejaksaan untuk mengusut proyek tersebut.



## **SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU**

**MEDIA : Ambon Ekspres**

Karena bagi kami, itu penting dan harus dituntaskan karena demikian keuntungannya hanya kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab,” tandas Riry.

Dia mengaku, Pulau Kassa masuk dalam petuanan Negeri Kaibobu dan menjadi milik sah dari Negeri Kaibobu. Sementara pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut tidak ada koordinasi dengan pihak Pemerintah Negeri Kaibobu. “Kami mendukung sepenuhnya langkah kejaksaan untuk menuntaskan kasus tersebut. Karena pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut hingga tidak pernah dilakukan koordinasi dengan pihak negeri selaku pihak yang memiliki kekuasaan penuh terhadap tempat wisata Pulau Kassa tersebut,” tegas Riry. **(MG1)**

<http://ambonekspres.fajar.co.id/2017/04/13/jaksa-lidik-tambatan-perahu-pulau-kassa/2/>